

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diambil simpulan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan kemiskinan di Kalimantan Barat. Tingginya angka kelahiran dan kurangnya pemerataan akses sumber daya menjadi faktor utama. Meskipun jumlah penduduk meningkat, wilayah pedesaan dengan akses pendidikan dan infrastruktur terbatas menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor informal dalam perekonomian Kalimantan Barat. Sektor ini memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Upaya pemerintah, seperti program pelatihan kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, turut mendukung pengurangan kemiskinan, meskipun dampaknya belum sepenuhnya merata.
3. Rata-Rata Lama Sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan rata-rata lama sekolah mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, yang berdampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan peluang kerja. Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah meningkat, diiringi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
4. Secara simultan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat. Interaksi antara faktor demografi, ketenagakerjaan, dan pendidikan ini menunjukkan pentingnya kebijakan komprehensif untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah perlu fokus pada pengendalian jumlah penduduk,

peningkatan akses pendidikan yang merata, serta pemberdayaan sektor informal untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

## **V.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam proses penyusunan penelitian ini tentunya terdapat berbagai keterbatasan penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel sosial ekonomi, yaitu jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah sebagai variabel independen. Hal ini berpotensi mengabaikan faktor lain yang signifikan dalam memengaruhi kemiskinan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, atau distribusi pendapatan, yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada rentang waktu 2008-2023, sehingga tidak mencakup tren jangka panjang atau dampak historis yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, seperti fenomena krisis ekonomi pada tahun 1998.

## **V.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat merekomendasikan beberapa masukan dan saran di antaranya:

### **V.3.1 Saran Teoritis**

1. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel bebas lain yang belum dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan.
2. Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan rentang waktu yang lebih panjang. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika yang lebih luas dan menghasilkan temuan yang relevan untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan.
3. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas kajian literatur terkait variabel yang digunakan. Dengan landasan teori yang lebih kuat, penelitian

dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan kebijakan.

### **V.3.2 Saran Praktis**

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyelenggarakan program sosialisasi di wilayah pedesaan untuk mendorong keluarga agar memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan program-program pemerintah, seperti pelatihan keterampilan, untuk meningkatkan kompetensi kerja.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor unggulan, seperti pertanian dan perkebunan, yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Barat. Kebijakan tersebut perlu mendorong terciptanya lapangan kerja baru, khususnya di daerah pedalaman, dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Selain itu, perlu adanya upaya mendorong masyarakat untuk berwirausaha, terutama melalui dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan.
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan, dan akses kesehatan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan.